

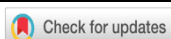


Pendampingan Tata Kelola Kolaboratif melalui Gerakan Gotong Royong sebagai Upaya Penguatan Modal Sosial Masyarakat

Gandiansyah Tarsan Efendi, Azzahra Faranisa, Desi Br Harahap, Rina Fatimah,

Rizki Novriansyah Wiguna, *Fachri Faisal

Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia



DOI: <https://doi.org/10.5362/jippmas.v6i2.899>

Informasi Artikel

Riwayat Artikel:

Diterima: 10 Agustus 2026

Revisi Akhir: 22 September 2026

Disetujui: 24 September 2026

Terbit: 30 September 2026

Kata Kunci:

Gotong royong;

Modal sosial;

Partisipasi masyarakat;

Pengelolaan lingkungan;

Tata kelola kolaboratif.



ABSTRAK

Permasalahan kebersihan lingkungan di Kelurahan Lubuk Lintang, Kabupaten Seluma, tidak hanya berupa penumpukan sampah, tetapi juga belum teraturnya koordinasi dan jadwal gotong royong. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memperkuat tata kelola kolaboratif dan mendorong penguatan modal sosial masyarakat melalui gerakan gotong royong. Metode PkM mengadopsi prinsip Participatory Action Research (PAR) melalui identifikasi kebutuhan bersama mitra, perencanaan dan pembagian peran, edukasi, aksi gotong royong, monitoring, refleksi-evaluasi, dan penyusunan mekanisme keberlanjutan. Kegiatan berlangsung selama tiga minggu, satu kali setiap minggu secara bergilir di RW 1, RW 2, dan RW 3, melibatkan 50 peserta dari unsur kelurahan, masyarakat, mahasiswa KKN, Yonif TP 891/MS, dan Dinas Lingkungan Hidup. Evaluasi dilakukan secara deskriptif menggunakan daftar hadir, lembar observasi, dokumentasi sebelum-sesudah, dan diskusi evaluatif. Hasil menunjukkan seluruh tahapan terlaksana, pembagian peran antarpemangku kepentingan berjalan, lokasi sasaran tampak lebih bersih, serta tersusun jadwal gotong royong rutin dan mekanisme koordinasi lanjutan. Interaksi, kerja sama, dan tanggung jawab bersama selama kegiatan menjadi indikasi penguatan modal sosial, meskipun belum diukur dengan instrumen kuantitatif. Model ini dapat digunakan sebagai acuan pengelolaan lingkungan partisipatif di tingkat kelurahan.

PENDAHULUAN

Permasalahan kebersihan lingkungan merupakan salah satu tantangan dalam pembangunan berkelanjutan di tingkat masyarakat karena dipengaruhi oleh perilaku masyarakat, koordinasi antarpemangku kepentingan, serta pengelolaan lingkungan yang belum optimal. Kelurahan Lubuk Lintang, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.534 jiwa yang tersebar di 9 RT dan 3 RW. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan koordinasi dengan Lurah, Ketua RW, tokoh masyarakat, serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma, masih ditemukan beberapa titik penumpukan sampah, yaitu di tepi jalan pada RW 1, saluran drainase di RW 2, dan area pekarangan menuju kawasan perkantoran di RW 3. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan kebersihan lingkungan masih memerlukan penanganan yang lebih terkoordinasi agar dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Hasil analisis kebutuhan bersama mitra menunjukkan bahwa permasalahan prioritas tidak hanya berkaitan dengan keberadaan sampah, tetapi juga belum optimalnya koordinasi pelaksanaan gotong royong serta belum tersusunnya jadwal kegiatan yang terstruktur. Sebelum kegiatan pengabdian dilaksanakan, pelaksanaan gotong royong belum memiliki mekanisme yang terjadwal sehingga partisipasi masyarakat belum terkoordinasi secara sistematis. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemerintah Kelurahan Lubuk Lintang, Ketua RW, tokoh masyarakat, dan Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Seluma, disepakati bahwa diperlukan penguatan tata kelola kolaboratif melalui pembagian peran yang jelas, peningkatan koordinasi, edukasi pengelolaan lingkungan, serta penyusunan jadwal gotong royong yang dilaksanakan secara rutin.

Permasalahan lingkungan tidak lagi dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan birokrasi yang bersifat hierarkis, tetapi memerlukan sinergi berbagai pemangku kepentingan dalam suatu proses kolaboratif (Ahmad & Esposito, 2025; Mukhlis, 2022). Dalam konteks tersebut, tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) berkembang sebagai pendekatan yang menempatkan pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil sebagai mitra dalam menyelesaikan permasalahan publik melalui pencapaian tujuan bersama (Van Dorsselaer et al., 2025). Analisis dalam kegiatan pengabdian ini mengacu pada lima dimensi *collaborative governance*, yaitu *starting conditions*, *institutional design*, *collaborative process*, *capacity for joint action*, dan *collaborative outcomes*. Kelima dimensi tersebut digunakan untuk menjelaskan kondisi awal yang melatarbelakangi kolaborasi, pengaturan kelembagaan, proses interaksi antarpemangku kepentingan, kapasitas kerja sama, serta hasil yang dicapai melalui pelaksanaan program (Avoyan, 2023; Butler & Current, 2021; Van Dorsselaer et al., 2025). Dengan demikian, keberhasilan tata kelola kolaboratif tidak hanya ditentukan oleh keterlibatan berbagai aktor, tetapi juga oleh kualitas koordinasi, pembagian peran, komitmen bersama, dan capaian yang dihasilkan.

Dalam pengelolaan lingkungan, tata kelola kolaboratif memiliki keterkaitan erat dengan modal sosial yang meliputi kepercayaan, jaringan sosial, norma bersama, dan hubungan timbal balik. Modal sosial berperan penting dalam mendorong tindakan kolektif masyarakat, sedangkan lemahnya kepercayaan dan koordinasi dapat menghambat keberhasilan program lingkungan (Jia et al., 2026; Zambrano-Gutiérrez et al., 2023; Zhang & Gu, 2021). Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan lingkungan dipengaruhi oleh kepemimpinan kolaboratif, komunikasi yang terbuka, pembagian peran yang jelas, dan partisipasi aktif masyarakat (Farid et al., 2025; Imron et al., 2021; Sihalohe & Rusliadi, 2025). Salah satu bentuk aksi kolektif yang masih kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia adalah budaya gotong royong. Selain mencerminkan nilai sosial budaya, gotong royong menjadi mekanisme yang mampu memperkuat kerja sama, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, serta mempererat hubungan antarwarga dan antarlembaga dalam pengelolaan lingkungan (Baudoin & Gittins, 2021; Butler & Current, 2021). Pelibatan masyarakat secara partisipatif dalam pengelolaan lingkungan dapat meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan masyarakat sekaligus memperkuat kepedulian terhadap pengelolaan sampah yang berkelanjutan (Lysander et al., 2026).

Secara konseptual, tiga unsur utama pada fokus PkM ini – tata kelola kolaboratif, gotong royong, dan modal sosial – dapat dipahami sebagai hubungan antara struktur kerja sama, arena tindakan kolektif, dan sumber daya relasional. Tata kelola kolaboratif menyediakan aturan interaksi melalui komunikasi, pembagian peran, pengambilan keputusan bersama, dan kapasitas bertindak; gotong royong menjadi arena tempat mekanisme tersebut dipraktikkan; sedangkan modal sosial tercermin pada kepercayaan, jaringan lintasaktor, norma resiprositas, dan kemauan melanjutkan aksi bersama (Butler & Current, 2021; Gonzaga & Pratama, 2025; Jia et al., 2026; Zambrano-Gutiérrez et al., 2023). Dalam kegiatan ini, modal sosial tidak diukur sebagai konstruk psikometrik, sehingga penguatannya ditafsirkan secara hati-hati melalui indikator observasional berupa komunikasi antarpihak, pembagian tanggung jawab, keterlibatan dalam aksi bersama, dan kesepakatan mekanisme keberlanjutan.

Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan bersama mitra, tim pengabdian menawarkan solusi melalui penguatan tata kelola kolaboratif dalam gerakan gotong royong. Solusi tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi pengelolaan lingkungan, pembagian peran antarpemangku kepentingan, penyusunan jadwal gotong royong, serta pelaksanaan kegiatan secara rutin satu kali seminggu selama tiga minggu di RW 1, RW 2, dan RW 3. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan koordinasi antarpemangku kepentingan, mendorong partisipasi aktif masyarakat, serta mendukung terbentuknya mekanisme pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Berbagai kajian mengenai tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan lingkungan menunjukkan bahwa implementasinya masih banyak berfokus pada tingkat pemerintah daerah atau institusi formal (Ahmad & Esposito, 2025; Butler & Current, 2021; Pratama & Roziqin, 2021; Wang & Zhao, 2021). Penerapan pendekatan tersebut dalam kegiatan pengabdian berbasis gotong royong pada tingkat kelurahan masih relatif terbatas. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini dilaksanakan untuk memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan sekaligus memperkuat modal sosial masyarakat melalui pengelolaan lingkungan yang partisipatif (Mukhlis, 2022; Pratiwi et al., 2024; Martitah et al., 2025; Shidiq et al., 2024; Sari et al., 2024; Tuanaya, 2026). Pendekatan partisipatif juga menempatkan masyarakat sebagai pelaku aktif dalam penyelesaian persoalan lingkungan dan membuka ruang kerja sama antara masyarakat, pemerintah, serta institusi pendidikan (Basir et al., 2023).

Kegiatan pengabdian ini bertujuan menerapkan tata kelola kolaboratif dalam gerakan gotong royong melalui penataan pembagian peran, penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan, edukasi pengelolaan lingkungan, dan penyusunan mekanisme kegiatan berkelanjutan di Kelurahan Lubuk Lintang. Indikator keberhasilan kegiatan meliputi tersusunnya jadwal gotong royong berbasis RW, terlaksananya kegiatan secara rutin selama tiga minggu, keterlibatan 50 peserta yang berasal dari Pemerintah Kelurahan Lubuk Lintang, masyarakat, mahasiswa KKN Universitas Bengkulu, personel Yonif TP 891/MS, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma, serta terlaksananya koordinasi antarpemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan sesuai dengan pembagian peran yang telah disepakati (Gonzaga & Pratama, 2025; Martitah et al., 2025; Sari et al., 2024).

METODE PELAKSANAAN

Pendekatan PkM

Kegiatan ini mengadopsi prinsip Participatory Action Research (PAR) sebagai kerangka pendampingan partisipatif. PAR menempatkan mitra sebagai pelaku yang terlibat dalam identifikasi masalah, penyusunan rencana tindakan, pelaksanaan aksi, pengamatan hasil, serta refleksi untuk perbaikan dan keberlanjutan program. Pendekatan tersebut relevan dengan PkM berbasis lingkungan karena solusi dibangun bersama masyarakat dan pemangku kepentingan, bukan diberikan secara satu arah; penerapan PAR pada pengabdian lingkungan juga digunakan oleh Basir et al. (2023). Dalam artikel ini, PAR dipakai sebagai kerangka proses PkM dan bukan sebagai desain eksperimen untuk menguji hubungan sebab-akibat.

Lokasi, Mitra, dan Peserta

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Kelurahan Lubuk Lintang, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu pada saat pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Bengkulu Tahun 2026. Lokasi dipilih berdasarkan

hasil observasi awal dan koordinasi dengan Pemerintah Kelurahan Lubuk Lintang yang menunjukkan bahwa permasalahan kebersihan lingkungan masih menjadi prioritas penanganan. Permasalahan tersebut ditandai dengan adanya penumpukan sampah di tepi jalan RW 1, saluran drainase RW 2, serta area pekarangan menuju kawasan perkantoran di RW 3. Selain berdampak pada kebersihan lingkungan, kondisi tersebut memerlukan penguatan koordinasi dan partisipasi masyarakat agar pengelolaannya dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Hasil identifikasi kebutuhan bersama mitra menunjukkan bahwa permasalahan utama tidak hanya berkaitan dengan keberadaan sampah, tetapi juga belum tersusunnya mekanisme pelaksanaan gotong royong yang terjadwal serta pembagian peran antarpemangku kepentingan. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian difokuskan pada penguatan tata kelola kolaboratif melalui koordinasi, pembagian peran, edukasi pengelolaan lingkungan, dan penyusunan jadwal gotong royong secara rutin. Sasaran kegiatan meliputi Pemerintah Kelurahan Lubuk Lintang, perangkat kelurahan, Ketua RW, masyarakat, mahasiswa KKN Universitas Bengkulu, personel Yonif TP 891/MS, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma.

Kegiatan melibatkan 50 peserta yang berasal dari berbagai unsur pemangku kepentingan sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Keterlibatan tersebut mencerminkan penerapan tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan lingkungan melalui koordinasi, pembagian peran, dan tanggung jawab bersama. Komposisi mitra dan peserta kegiatan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Mitra dan peserta kegiatan pengabdian

No.	Mitra/Peserta	Jumlah	Keterangan
1	Lurah Lubuk Lintang	1 orang	Penanggung jawab kegiatan
2	Perangkat Kelurahan	7 orang	Koordinator lapangan
3	Ketua RW	3 orang	Koordinator wilayah
4	Masyarakat	11 orang	Peserta gotong royong
5	Mahasiswa KKN	10 orang	Fasilitator kegiatan
6	Personel Yonif TP 891/MS	15 orang	Mitra kolaborasi
7	Dinas Lingkungan Hidup	3 orang	Pendamping teknis
	Total	50 orang	

Tahapan Pelaksanaan

Operasionalisasi pendekatan PAR dilakukan dalam enam tahap yang saling berurutan, yaitu: (1) identifikasi kebutuhan dan kondisi awal; (2) perencanaan kolaboratif serta penyepakatan peran; (3) aksi berupa edukasi dan gotong royong; (4) monitoring proses dan capaian fisik; (5) refleksi-evaluasi bersama mitra; serta (6) penyusunan tindak lanjut dan mekanisme keberlanjutan. Alur tersebut memastikan bahwa mitra terlibat sejak penentuan masalah hingga penyepakatan keberlanjutan program. Alur pelaksanaan disajikan pada Gambar 1.

Tahap 1—identifikasi kebutuhan dan kondisi awal. Tim melakukan observasi lapangan dan koordinasi dengan Pemerintah Kelurahan Lubuk Lintang, Ketua RW, tokoh masyarakat, serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma. Tahap ini memetakan titik penumpukan sampah, kondisi kebersihan, pola gotong royong yang

telah berjalan, serta persoalan koordinasi yang menjadi dasar penentuan prioritas program.

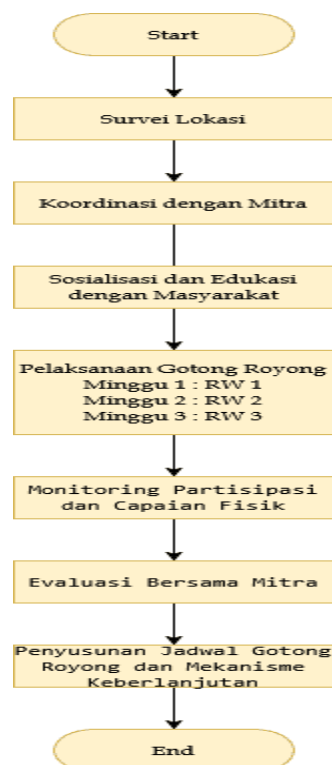
Tahap 2—perencanaan kolaboratif. Hasil identifikasi dibahas dalam koordinasi bersama untuk menetapkan lokasi sasaran, jadwal pelaksanaan, dan pembagian tugas. Pemerintah Kelurahan bertindak sebagai penanggung jawab dan koordinator, Ketua RW sebagai koordinator wilayah, masyarakat sebagai pelaksana utama, mahasiswa KKN sebagai fasilitator, personel Yonif TP 891/MS sebagai mitra kolaborasi, dan Dinas Lingkungan Hidup sebagai pendamping teknis.

Tahap 3—aksi kolaboratif. Kegiatan diawali dengan sosialisasi dan edukasi mengenai kebersihan lingkungan, tanggung jawab bersama, dan pentingnya partisipasi masyarakat. Aksi gotong royong kemudian dilaksanakan satu kali setiap minggu selama tiga minggu secara bergilir di RW 1, RW 2, dan RW 3, dengan fokus pembersihan tepi jalan, saluran drainase, lingkungan permukiman, serta area pekarangan menuju kawasan perkantoran.

Tahap 4—monitoring. Selama aksi berlangsung, tim menggunakan lembar observasi, daftar hadir, dan dokumentasi sebelum-sesudah untuk mencatat keterlibatan unsur pemangku kepentingan, keterlaksanaan pembagian peran, koordinasi lapangan, dan perubahan visual kondisi kebersihan pada setiap lokasi sasaran.

Tahap 5—refleksi dan evaluasi. Setelah rangkaian aksi selesai, hasil observasi dan dokumentasi dibahas bersama mitra melalui diskusi evaluatif. Forum ini digunakan untuk menilai ketercapaian kegiatan, mengidentifikasi kendala partisipasi dan koordinasi, serta merumuskan perbaikan program.

Tahap 6—tindak lanjut dan keberlanjutan. Berdasarkan refleksi bersama, mitra menyusun jadwal gotong royong rutin berbasis RW, memperjelas penanggung jawab koordinasi, dan menyepakati mekanisme monitoring serta evaluasi lanjutan agar kegiatan dapat diteruskan setelah program pengabdian berakhir.



Gambar 1. Diagram alir pendekatan partisipatif/ PAR dalam pelaksanaan kegiatan

Evaluasi dan Analisis Data

Evaluasi kegiatan pengabdian dilakukan menggunakan instrumen berupa lembar observasi, daftar hadir peserta, dokumentasi sebelum dan sesudah kegiatan, serta hasil diskusi evaluatif bersama mitra yang meliputi Pemerintah Kelurahan Lubuk Lintang, Ketua RW, tokoh masyarakat, mahasiswa KKN Universitas Bengkulu, personel Yonif TP 891/MS, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma. Observasi digunakan untuk menilai keterlaksanaan kegiatan, partisipasi masyarakat, pelaksanaan pembagian peran, efektivitas koordinasi antarpemangku kepentingan, serta perubahan kondisi kebersihan lingkungan. Dokumentasi sebelum dan sesudah kegiatan dimanfaatkan sebagai bukti visual perubahan kondisi lingkungan, sedangkan daftar hadir digunakan untuk mengidentifikasi keterlibatan peserta dari setiap unsur pemangku kepentingan.

Keberhasilan kegiatan dievaluasi berdasarkan indikator operasional yang telah ditetapkan, meliputi keterlaksanaan seluruh tahapan kegiatan sesuai rencana, keterwakilan seluruh unsur pemangku kepentingan dalam rangkaian kegiatan, terlaksananya kegiatan secara bergilir di RW 1, RW 2, dan RW 3 sesuai jadwal, adanya perubahan kondisi kebersihan lingkungan berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi sebelum dan sesudah, serta tersusunnya jadwal gotong royong rutin berbasis RW beserta mekanisme koordinasi, monitoring, dan evaluasi lanjutan sebagai mekanisme keberlanjutan program. Hasil evaluasi dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan, kemudian dibahas bersama mitra sebagai dasar penyempurnaan pelaksanaan program.

Tabel 2. Instrumen, indikator, dan kriteria keberhasilan evaluasi

Instrumen	Indikator	Kriteria Keberhasilan
Daftar hadir	Keterwakilan unsur pemangku kepentingan	Keterwakilan seluruh unsur pemangku kepentingan tercatat dalam rangkaian kegiatan dan jumlah peserta total 50 orang
Lembar observasi	Keterlaksanaan tahapan kegiatan	Seluruh tahapan kegiatan terlaksana sesuai jadwal
Lembar observasi	Koordinasi dan pembagian peran	Setiap pemangku kepentingan menjalankan peran sesuai kesepakatan
Dokumentasi sebelum–sesudah	Kondisi kebersihan lingkungan	Terlihat perubahan kondisi kebersihan pada lokasi sasaran
Diskusi evaluatif dan dokumen jadwal	Keberlanjutan program	Tersusun jadwal gotong royong rutin berbasis RW serta mekanisme koordinasi lanjutan yang memuat pola rotasi wilayah, pembagian peran, monitoring, dan evaluasi

Tabel 2 menunjukkan bahwa evaluasi kegiatan dilakukan menggunakan beberapa instrumen yang saling melengkapi untuk menilai keterlaksanaan program. Setiap instrumen memiliki indikator dan kriteria keberhasilan yang menjadi acuan dalam mengevaluasi keterwakilan peserta, efektivitas koordinasi, perubahan kondisi kebersihan lingkungan, serta keberlanjutan program. Pada indikator kehadiran, evaluasi didasarkan pada keterwakilan seluruh unsur pemangku kepentingan dalam rangkaian kegiatan dan jumlah peserta total 50 orang; data kehadiran setiap peserta pada setiap pertemuan belum tersedia. Indikator keberlanjutan dibuktikan melalui jadwal gotong

royong berbasis RW dan mekanisme koordinasi lanjutan yang disajikan pada Tabel 5. Hasil evaluasi berdasarkan indikator tersebut menjadi dasar penyusunan hasil kegiatan dan rekomendasi tindak lanjut bersama mitra.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil pengabdian disajikan mengikuti tahapan pendekatan partisipatif/ PAR agar keterkaitan antara metode dan capaian program terlihat secara langsung. Kegiatan berlangsung selama tiga minggu dengan frekuensi satu kali setiap minggu secara bergilir di RW 1, RW 2, dan RW 3, serta melibatkan 50 peserta dari unsur kelurahan, masyarakat, Ketua RW, mahasiswa KKN, personel Yonif TP 891/MS, dan Dinas Lingkungan Hidup. Capaian mencakup hasil proses kolaborasi, hasil aksi lapangan, monitoring perubahan kondisi lingkungan, serta luaran refleksi berupa mekanisme keberlanjutan.

Pada tahap identifikasi kebutuhan dan perencanaan kolaboratif, tiga lokasi prioritas ditetapkan, yaitu tepi jalan RW 1, saluran drainase dan lingkungan permukiman RW 2, serta area pekarangan menuju kawasan perkantoran RW 3. Koordinasi kemudian menghasilkan kesepakatan jadwal, lokasi, pembagian peran, dan mekanisme kerja. Pemerintah Kelurahan menjadi koordinator, Ketua RW mengoordinasikan wilayah, masyarakat menjadi pelaksana utama, mahasiswa KKN memfasilitasi kegiatan, personel Yonif TP 891/MS mendukung aksi lapangan, dan Dinas Lingkungan Hidup memberikan pendampingan teknis.

Tabel 3. Ketercapaian hasil pengabdian berdasarkan tahapan partisipatif/ PAR

Tahap PAR	Capaian PkM	Bukti/Luaran	Status
Identifikasi kebutuhan	Tiga titik prioritas kebersihan teridentifikasi dan persoalan koordinasi/jadwal gotong royong dipetakan.	Catatan observasi dan hasil koordinasi awal	Tercapai
Perencanaan kolaboratif	Jadwal tiga minggu, lokasi, dan pembagian peran antarpemangku kepentingan disepakati.	Kesepakatan jadwal dan pembagian peran; Gambar 2 dan Tabel 4	Tercapai
Aksi	Edukasi dan gotong royong dilaksanakan bergilir di RW 1, RW 2, dan RW 3 dengan keterlibatan 50 peserta lintas unsur.	Dokumentasi kegiatan dan daftar hadir; Tabel 4	Tercapai
Monitoring	Keterlaksanaan peran dan perubahan visual kebersihan dipantau selama kegiatan.	Lembar observasi dan dokumentasi sebelum-sesudah (Gambar 3)	Tercapai
Refleksi-evaluasi	Kendala partisipasi dan koordinasi dibahas bersama mitra sebagai dasar penyempurnaan program.	Hasil diskusi evaluatif	Tercapai

Tahap PAR	Capaian PkM	Bukti/Luaran	Status
Tindak lanjut & keberlanjutan	Jadwal gotong royong rutin berbasis RW, penanggung jawab koordinasi, serta mekanisme monitoring dan evaluasi lanjutan disepakati.	Dokumen jadwal dan mekanisme keberlanjutan (Tabel 5)	Tercapai

Tabel 3 memperlihatkan keterkaitan langsung antara enam tahapan pendekatan PAR dan hasil PkM. Identifikasi kondisi awal menghasilkan fokus lokasi; perencanaan menghasilkan jadwal dan pembagian peran; aksi menghasilkan pelaksanaan edukasi serta gotong royong; monitoring menghasilkan bukti visual perubahan kondisi lingkungan; refleksi-evaluasi menghasilkan identifikasi kendala dan perbaikan; sedangkan tindak lanjut menghasilkan jadwal rutin serta mekanisme koordinasi, monitoring, dan evaluasi keberlanjutan. Dengan demikian, hasil program tidak hanya berupa pembersihan lokasi, tetapi juga berupa tata kerja kolaboratif yang terdokumentasi dan dapat digunakan untuk kegiatan lanjutan.



Gambar 2. Koordinasi dan penyepakatan peran antarpemangku kepentingan

Gambar 2 memperlihatkan proses koordinasi sebelum pelaksanaan gotong royong. Pada tahap ini, mitra menyepakati jadwal, lokasi, pembagian peran, dan mekanisme kerja. Koordinasi tersebut menjadi landasan pelaksanaan kegiatan secara kolaboratif karena setiap pihak memiliki tugas yang jelas sebelum kegiatan lapangan dimulai. Setelah kesepakatan terbentuk, gotong royong dilaksanakan secara bergilir di RW 1, RW 2, dan RW 3. Perubahan kondisi lingkungan pada ketiga wilayah tersebut disajikan pada Gambar 3.

Sebelum

Sesudah

RW 1





Gambar 3. Kondisi lingkungan sebelum dan sesudah pelaksanaan gotong royong di RW 1, RW 2, dan RW 3

Gambar 3 memperlihatkan kondisi lingkungan sebelum dan sesudah pelaksanaan gerakan gotong royong di RW 1, RW 2, dan RW 3. Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi, titik yang sebelumnya terdapat penumpukan sampah, saluran drainase yang kurang bersih, dan area pekarangan yang belum tertata tampak lebih bersih setelah kegiatan dilaksanakan. Dokumentasi sebelum-sesudah digunakan sebagai bukti visual capaian fisik sekaligus bahan evaluasi bersama mitra. Rincian waktu pelaksanaan, lokasi, jenis kegiatan, dan aktor yang terlibat disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Jadwal dan pelaksanaan aksi gotong royong selama program

Minggu	Lokasi	Kegiatan	Aktor yang Terlibat
I	RW 1	Pembersihan tepi jalan dan saluran drainase	Pemerintah Kelurahan, Masyarakat, Mahasiswa KKN, personel Yonif TP 891/MS
II	RW 2	Pembersihan lingkungan permukiman dan saluran drainase	Pemerintah Kelurahan, Masyarakat, Mahasiswa KKN, Dinas Lingkungan Hidup
III	RW 3	Pembersihan area pekarangan menuju kawasan perkantoran dan fasilitas umum	Pemerintah Kelurahan, Masyarakat, Mahasiswa KKN, personel Yonif TP 891/MS, Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 4 mendokumentasikan jadwal pelaksanaan gotong royong selama program, yaitu satu kali setiap minggu selama tiga minggu secara bergilir di RW 1, RW 2, dan RW 3 sesuai kebutuhan lokasi. Pemerintah Kelurahan, masyarakat, dan mahasiswa KKN terlibat secara konsisten, sedangkan personel Yonif TP 891/MS dan Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Seluma memberikan dukungan sesuai kebutuhan lapangan. Pola keterlibatan tersebut memungkinkan sumber daya antarmitra digunakan secara saling melengkapi. Pada akhir rangkaian kegiatan, lokasi sasaran di ketiga RW telah dibersihkan dan mitra menyepakati jadwal gotong royong rutin berbasis RW beserta mekanisme koordinasi, monitoring, dan evaluasi sebagai tindak lanjut. Dokumen mekanisme keberlanjutan tersebut dirangkum pada Tabel 5.

Dokumentasi Jadwal dan Mekanisme Keberlanjutan

Pada akhir pelaksanaan, mitra menyepakati keberlanjutan gerakan gotong royong melalui pola satu kali setiap minggu secara bergilir di RW 1, RW 2, dan RW 3. Pemerintah Kelurahan dan Ketua RW berperan dalam koordinasi pelaksanaan, masyarakat menjadi pelaksana utama, sedangkan mitra pendukung terlibat sesuai kebutuhan lapangan. Monitoring dilakukan menggunakan daftar hadir, lembar observasi, dan dokumentasi sebelum-sesudah, kemudian hasil pelaksanaan dibahas dalam evaluasi bersama untuk menentukan tindak lanjut. Jadwal dan mekanisme yang telah disusun bersama mitra disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Jadwal dan Mekanisme Keberlanjutan Gotong Royong Berbasis RW		
Komponen	Kesepakatan/Mekanisme	Penanggung Jawab dan Bukti
Frekuensi dan rotasi	1×/minggu; bergilir RW 1, RW 2, dan RW 3.	Kelurahan dan Ketua RW; jadwal berbasis RW.
Koordinasi dan peran	Kelurahan mengoordinasikan; Ketua RW mengoordinasikan wilayah; masyarakat pelaksana utama; mitra pendukung sesuai kebutuhan.	Kesepakatan peran dan dokumentasi koordinasi (Gambar 2).
Pelaksanaan lapangan	Pembersihan diarahkan pada titik prioritas kebersihan sesuai kebutuhan tiap RW.	Masyarakat dan mitra; dokumentasi sebelum-sesudah (Gambar 3).
Monitoring	Partisipasi, pembagian peran, koordinasi, dan perubahan kondisi kebersihan diamati selama kegiatan.	Daftar hadir, lembar observasi, dan dokumentasi.
Evaluasi dan tindak lanjut	Hasil dibahas bersama mitra untuk mengidentifikasi kendala dan menyempurnakan jadwal serta koordinasi siklus berikutnya.	Seluruh mitra; diskusi evaluatif.

Tabel 5 menunjukkan bahwa luaran keberlanjutan program tidak hanya berupa kesepakatan untuk melanjutkan gotong royong, tetapi telah dirumuskan menjadi pola operasional yang memuat frekuensi dan rotasi wilayah, pembagian peran, pelaksanaan lapangan, monitoring, serta evaluasi. Mekanisme ini menjadi acuan bagi Pemerintah Kelurahan dan Ketua RW untuk mengoordinasikan kegiatan lanjutan, sekaligus memberikan bukti yang lebih jelas terhadap indikator keberlanjutan pada Tabel 2.

Perubahan yang teramati selama pelaksanaan kegiatan tidak hanya berupa kondisi lingkungan yang tampak lebih bersih berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi, tetapi juga terbentuknya pola koordinasi yang lebih terstruktur dalam pelaksanaan gotong royong. Pemerintah Kelurahan memperoleh mekanisme pelaksanaan kegiatan yang lebih sistematis melalui penyusunan jadwal gotong royong rutin berbasis RW. Selama pelaksanaan kegiatan, masyarakat menunjukkan keterlibatan dalam komunikasi, kerja sama, dan pelaksanaan gotong royong. Bagi mahasiswa KKN, kegiatan ini menjadi

sarana pembelajaran dalam membangun kolaborasi dengan masyarakat dan pemerintah, sedangkan bagi instansi pendukung, kegiatan ini dapat membentuk koordinasi dan sinergi dalam pengelolaan lingkungan berbasis partisipasi masyarakat.

Sebagai sintesis hasil, capaian kegiatan dipetakan ke dalam lima dimensi collaborative governance – starting conditions, institutional design, collaborative process, capacity for joint action, dan collaborative outcomes – serta dikaitkan secara deskriptif dengan indikator modal sosial yang teramati selama program. Pemetaan ini tidak dimaksudkan sebagai pengukuran kuantitatif modal sosial, tetapi sebagai kerangka untuk menunjukkan hubungan antara proses kolaborasi dan dinamika relasional selama PkM.

Tabel 6. Pemetaan capaian PkM berdasarkan dimensi collaborative governance

Dimensi Collaborative Governance	Capaian PkM	Indikasi keterkaitan dengan modal sosial
Kondisi Awal	Permasalahan kebersihan lingkungan berhasil diidentifikasi melalui observasi dan koordinasi dengan mitra sebagai dasar pelaksanaan gerakan gotong royong.	Mengindikasikan tumbuhnya kepedulian masyarakat serta membangun kepercayaan terhadap pelaksanaan program.
Desain Kelembagaan	Terbentuk pembagian peran yang jelas antara Pemerintah Kelurahan, Ketua RW, masyarakat, mahasiswa KKN, Yonif TP 891/MS, dan Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan kegiatan.	Mengindikasikan terbangunnya koordinasi, tanggung jawab, dan sinergi antarpemangku kepentingan.
Proses Kolaborasi	Koordinasi, sosialisasi, dan kegiatan gotong royong dilaksanakan secara bertahap di RW 1, RW 2, dan RW 3 dengan melibatkan seluruh mitra.	Mengindikasikan adanya komunikasi antarpemangku kepentingan serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.
Kapasitas Tindakan Bersama	Seluruh mitra berkontribusi sesuai kapasitas melalui dukungan tenaga, fasilitasi, edukasi, koordinasi, dan pendampingan teknis.	Mengindikasikan kerja sama antarmitra dalam penyelesaian permasalahan lingkungan.
Hasil Kolaborasi	Lingkungan tampak lebih bersih berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi, tersusun jadwal gotong royong rutin berbasis RW sebagai mekanisme keberlanjutan program.	Mengindikasikan terbentuknya kepercayaan, jaringan sosial, norma gotong royong, dan aksi kolektif masyarakat.

Tabel 6 menunjukkan bahwa hasil PkM dapat dibaca sebagai rangkaian kolaborasi: masalah bersama diidentifikasi, peran kelembagaan ditata, proses komunikasi dan aksi bersama dilaksanakan, kapasitas lintasaktor dimobilisasi, dan luaran keberlanjutan disepakati. Indikasi modal sosial tampak pada komunikasi lintasaktor, tanggung jawab yang dibagi, kerja sama, serta kesediaan melanjutkan kegiatan; namun indikator tersebut belum diukur menggunakan skala kuantitatif sehingga interpretasinya bersifat deskriptif.

Pembahasan

Pelaksanaan gerakan gotong royong di Kelurahan Lubuk Lintang menunjukkan bahwa penerapan tata kelola kolaboratif mendukung efektivitas pengelolaan lingkungan melalui keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan. Keberhasilan program tidak hanya ditunjukkan oleh kondisi lingkungan yang tampak lebih bersih berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi, tetapi juga oleh terlaksananya koordinasi, komunikasi, dan partisipasi masyarakat selama setiap tahapan kegiatan. Kolaborasi antara Pemerintah Kelurahan, Ketua RW, masyarakat, mahasiswa KKN Universitas Bengkulu, personel Yonif TP 891/MS, serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma membentuk mekanisme kerja bersama yang mendukung penyelesaian permasalahan lingkungan secara lebih terencana dibandingkan pelaksanaan gotong royong yang bersifat insidental.

Salah satu perubahan tata kelola yang paling nyata adalah peralihan dari gotong royong yang sebelumnya belum memiliki jadwal terstruktur menjadi mekanisme rutin satu kali setiap minggu secara bergilir pada RW 1, RW 2, dan RW 3. Mekanisme hasil pendampingan menempatkan Pemerintah Kelurahan dan Ketua RW sebagai pengoordinasi, masyarakat sebagai pelaksana utama, serta mitra pendukung sesuai kebutuhan lapangan. Monitoring melalui daftar hadir, lembar observasi, dokumentasi sebelum-sesudah, dan diskusi evaluatif menjadikan jadwal tersebut bukan sekadar daftar waktu, tetapi bagian dari mekanisme pengendalian dan keberlanjutan program (Tabel 5). Pengaturan ini memperjelas desain kelembagaan dan kapasitas tindakan bersama karena ritme kegiatan, tanggung jawab aktor, proses pemantauan, dan tindak lanjut menjadi lebih terstruktur.

Keberhasilan kegiatan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, adanya komitmen Pemerintah Kelurahan sebagai koordinator yang mampu mengoordinasikan seluruh rangkaian kegiatan mulai dari identifikasi kebutuhan, penyusunan jadwal, hingga evaluasi bersama. Kedua, pembagian peran yang jelas antarmitra menjadikan setiap pihak memahami fungsi dan tanggung jawabnya sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan lebih efektif. Ketiga, kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan mendukung keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan gotong royong. Selain itu, keterlibatan mahasiswa KKN sebagai fasilitator serta dukungan personel Yonif TP 891/MS dan Dinas Lingkungan Hidup mendukung koordinasi sekaligus memberikan pendampingan teknis selama pelaksanaan kegiatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh tersedianya sumber daya, tetapi juga oleh sinergi, komunikasi, dan komitmen seluruh pemangku kepentingan. Hasil pengabdian ini sejalan dengan kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh (Pratiwi et al., 2024) yang menunjukkan bahwa observasi awal, koordinasi dengan pemerintah desa, sosialisasi, dan kerja bakti mampu meningkatkan semangat gotong royong serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Sejalan dengan itu, (Shidiq et al., 2024) melaporkan bahwa pelaksanaan gotong royong secara rutin tidak hanya menghasilkan lingkungan yang lebih bersih, tetapi juga memperkuat kepedulian, kebersamaan, dan tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan (Pratiwi et al., 2024; Shidiq et al., 2024). Temuan tersebut juga konsisten dengan kegiatan pengabdian berbasis partisipatif yang menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran lingkungan, sedangkan pendekatan tindakan partisipatif menekankan pentingnya tindakan kolaboratif dan kerja sama antarpihak (Basir et al., 2023; Lysander et al., 2026). Dalam kegiatan di Kelurahan Lubuk Lintang, pola tersebut diperluas melalui

pembagian peran yang terstruktur antara pemerintah kelurahan, masyarakat, mahasiswa KKN, personel Yonif TP 891/MS, dan Dinas Lingkungan Hidup sebagai bentuk tata kelola kolaboratif dalam tindakan bersama.

Ditinjau dari teori collaborative governance, capaian tersebut dapat dipahami sebagai proses yang bergerak dari kondisi awal menuju desain kelembagaan, proses kolaborasi, kapasitas tindakan bersama, dan hasil kolaborasi. Identifikasi masalah bersama mengurangi perbedaan persepsi mengenai prioritas; pembagian peran memperjelas aturan kerja; komunikasi selama aksi membangun pemahaman bersama; dan kontribusi sumber daya lintas aktor memperkuat kapasitas untuk bertindak. Literatur menunjukkan bahwa kualitas kolaborasi lingkungan sangat dipengaruhi oleh desain interaksi, keterwakilan aktor, koordinasi, serta kemampuan mempertahankan tindakan bersama (Avoyan, 2023; Ahmad & Esposito, 2025; Van Dorsselaer et al., 2025; Wang & Zhao, 2021).

Dari perspektif modal sosial, gotong royong menyediakan ruang untuk mengaktifkan jaringan internal warga (*bonding*), hubungan antarkelompok dan organisasi (*bridging*), serta hubungan masyarakat dengan institusi publik (*linking*). Kepercayaan dan norma resiprositas tidak dapat disimpulkan hanya dari perubahan fisik kebersihan, tetapi dapat diindikasikan oleh kesediaan aktor berbagi peran, bekerja pada tujuan yang sama, mempertahankan komunikasi, dan menyepakati tindak lanjut. Keterkaitan antara modal sosial, partisipasi, dan tata kelola lingkungan juga ditekankan dalam studi Butler dan Current (2021), Gonzaga dan Pratama (2025), Jia et al. (2026), Zambrano-Gutiérrez et al. (2023), serta Zhang dan Gu (2021).

Dalam konteks pengabdian masyarakat, temuan ini juga memperlihatkan bahwa gotong royong menjadi lebih bermakna ketika tidak berhenti sebagai kerja bakti insidental, tetapi disertai pengorganisasian, pembagian tanggung jawab, dan mekanisme keberlanjutan. Pratiwi et al. (2024) dan Shidiq et al. (2024) menekankan fungsi kerja bakti dalam membangun kepedulian dan partisipasi, sedangkan Basir et al. (2023) dan Lysander et al. (2026) menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat dan kerja sama antarpihak dalam pengelolaan lingkungan. Nilai tambah program di Lubuk Lintang terletak pada pengintegrasian aksi gotong royong dengan mekanisme collaborative governance pada tingkat kelurahan.

Meskipun kegiatan berjalan sesuai rencana, pelaksanaan program masih menghadapi beberapa kendala. Tingkat partisipasi masyarakat pada setiap RW belum sepenuhnya merata karena sebagian warga memiliki keterbatasan waktu akibat aktivitas pekerjaan. Selain itu, sebelum kegiatan pengabdian dilaksanakan belum tersedia jadwal gotong royong yang tersusun secara sistematis sehingga koordinasi antarpemangku kepentingan belum berjalan secara optimal. Kendala tersebut diatasi melalui penyusunan jadwal gotong royong secara bergilir, pembagian tugas sesuai kapasitas masing-masing peserta, serta koordinasi yang dilakukan secara berkelanjutan oleh Pemerintah Kelurahan bersama Ketua RW dan seluruh mitra. Langkah tersebut mendorong keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan gotong royong sehingga seluruh tahapan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan rencana.

Kekuatan interpretasi hasil tetap dibatasi oleh desain evaluasi yang bersifat deskriptif. Data kuantitatif yang tersedia hanya jumlah peserta sebanyak 50 orang; jumlah peserta pada setiap pertemuan, tingkat kehadiran, volume sampah yang terkumpul, panjang drainase yang dibersihkan, serta skor perubahan modal sosial belum dikumpulkan secara kuantitatif. Karena itu, perubahan fisik dan penguatan modal sosial tidak dinyatakan sebagai efek kausal, melainkan sebagai capaian dan indikasi yang didukung oleh observasi, dokumentasi, daftar hadir, serta diskusi evaluatif bersama mitra.

Implikasi praktisnya, model pengelolaan lingkungan berbasis tata kelola kolaboratif ini dapat direplikasi di kelurahan atau desa lain dengan tetap menyesuaikan kondisi sosial dan kelembagaan setempat dan menambahkan instrumen evaluasi yang lebih terukur.

KESIMPULAN

Kegiatan PkM di Kelurahan Lubuk Lintang menunjukkan bahwa pendampingan berbasis prinsip Participatory Action Research (PAR) dapat mengoperasionalkan tata kelola kolaboratif melalui identifikasi kebutuhan, perencanaan bersama, pembagian peran, aksi gotong royong, monitoring, refleksi, dan tindak lanjut. Program melibatkan 50 peserta lintas pemangku kepentingan dan terlaksana selama tiga minggu secara bergilir di RW 1, RW 2, dan RW 3. Luaran utama berupa terlaksananya aksi pembersihan pada lokasi sasaran, tersusunnya pembagian peran, jadwal gotong royong rutin satu kali setiap minggu secara bergilir berbasis RW, serta mekanisme koordinasi, monitoring, dan evaluasi lanjutan. Interaksi, kerja sama, dan tanggung jawab bersama selama proses menjadi indikasi penguatan modal sosial, tetapi belum dapat dinyatakan sebagai perubahan kuantitatif karena instrumen khusus modal sosial tidak digunakan. Keterbatasan lain adalah belum tersedianya data kehadiran per pertemuan dan ukuran fisik hasil pembersihan. Tindak lanjut diarahkan pada pelaksanaan jadwal rutin, pencatatan partisipasi dan capaian fisik, evaluasi berkala oleh kelurahan dan Ketua RW, serta penggunaan instrumen pengukuran modal sosial agar keberlanjutan dan dampak program dapat dievaluasi secara lebih objektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Z., & Esposito, P. (2025). Collaborative Governance for Social Change and Environmental Sustainability: A Case Study of Campania Region. *Administrative Sciences*, 15(6), 217. <https://doi.org/10.3390/admsci15060217>
- Avoyan, E. (2023). Collaborative Governance for Innovative Environmental Solutions : Qualitative Comparative Analysis of Cases from Around the World. 670–684. <https://doi.org/10.1007/s00267-022-01642-7>
- Basir, B., Heriani, H., Rosadi, A. R. K., Khaerat, R. F., Lazarus, J., Darwis, N., Amelia, A. R., & Mar'a, N. (2023). Penyuluhan dan pelatihan pembuatan kompos organik dengan metode keranjang Takakura di Desa Biring Ere. *Jurnal Inovasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 32–43. <https://doi.org/10.53621/jippmas.v3i1.230>
- Baudoin, L., & Gittins, J. R. (2021). The ecological outcomes of collaborative governance in large river basins: Who is in the room and does it matter? *Journal of Environmental Management*, 281(December 2020), 111836. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.111836>
- Butler, M., & Current, D. (2021). Relationship between community capitals and governance : The perspective of local actors in the Maya Biosphere Reserve. *World Development Perspectives*, 21(December 2020), 100294. <https://doi.org/10.1016/j.wdp.2021.100294>
- Van Dorselaer, E., Voets, J., & Dupont, C. (2025). Implementing nature-based solutions in cities: Testing and refining the integrative framework for collaborative governance. *Environmental Policy and Governance*, 35(4), 761–774. <https://doi.org/10.1002/eet.70000>
- Gonzaga, G. L., & Pratama, A. B. (2025). Social capital and prospects for collaborative governance: An ethnographic case study of Sama-Bajaus' post-disaster experiences.

- Public Administration and Development, 45(3), 201–212.
<https://doi.org/10.1002/pad.2096>
- Farid, M., Muzaqi, A. H., & Ramadhani, G. T. (2025). Article Polycentric Collaborative Governance and Circular Economy in Urban Waste Systems : Public Value Co-Creation Through CSR – Community Partnerships in Surabaya , Indonesia. IX(2), 408–421.
- Imron, M., Assiddiq, D. U., & Kusuma, A. D. (2021). Dinamika kolaborasi komunitas peduli lingkungan dan pemerintah daerah dalam konservasi hutan mangrove di Kabupaten Malang. Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial, 6(2), 22–34.
<https://doi.org/10.36636/dialektika.v6i2.663>
- Jia, S., Shen, Q., Sun, Q., & Zhao, A. (2026). The Impact of Social Capital on Residents ' Participation in Environmental Governance : An Analysis Based on the Mediating Effects of Environmental Awareness and Government Satisfaction. Environmental Management. <https://doi.org/10.1007/s00267-025-02352-6>
- Lysander, M. A. S., Lestari, I. B. P., & Wulandari, S. (2026). Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah plastik berbasis ecobrick sebagai media edukasi lingkungan. Jurnal Inovasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 6(1), 228–246.
<https://doi.org/10.53621/jippmas.v6i1.834>
- Martitah, M., Sumarto, S., Pujiono, P., Hidayat, A., Putra, T. I., & Aini, T. R. (2025). The efficacy of collaborative governance in waste management: Evidence from Bandung Village, Kebumen Regency, Central Java. Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia, 8(1). <https://doi.org/10.15294/jphi.v8i1.28603>.
- Mukhlis, M. (2022). A Critical Analysis of the Challenges of Collaborative Governance in Climate Change Adaptation Policies in Bandar Lampung City , Indonesia.
- Pratama, I. D., Salahudin, & Roziqin, A. (2021). Tata kelola kolaboratif ruang terbuka hijau: Sebuah kajian pustaka terstruktur (systematic literature review). Jurnal Komunikasi Pembangunan, 19(02), 125–139.
<https://doi.org/10.46937/19202136310>
- Pratiwi, W. R., Gusti, H. I., & Acfira, L. G. (2024). Memupuk semangat gotong royong masyarakat melalui kerja bakti. Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 6(2), 261–265.
<https://doi.org/10.30596/ihsan.v6i2.18869>
- Sari, C. F., Salsabila, L., Lodan, K. T., & Dompok, T. (2024). Tantangan pertumbuhan sampah melalui tata kelola kota yang kolaboratif di Kota Batam. Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 6(2), 761–768.
<https://doi.org/10.14710/dialogue.v6i2.23809>
- Shidiq, A., Majid, A. B. A., Darmawan, D., Saleh, M., Evendi, W., Anwar, M. S., & Bangsu, M. (2024). Upaya membangun komunitas yang peduli lingkungan melalui kegiatan gotong royong menjaga kebersihan musholla. Manfaat: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia, 1(2), 12–19.
- Sihaloho, U. O., & Rusliadi, R. (2025). Collaborative governance in plastic waste recycling in Medan City: Integrating informal sector, community participation, and policy. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, 11(1).
<https://doi.org/10.26618/kjap.v11i1.17422>
- Tuanaya, W. (2026). Environmental Governance, Social Participation, and Sustainable Coastal Tourism in Eastern Indonesia. Baileo: Jurnal Sosial Humaniora, 3(3), 829–848.
- Wang, Y., & Zhao, Y. (2021). Is collaborative governance effective for air pollution prevention ? A case study on the Yangtze river delta region of China. Journal of

- Environmental Management, 292(December 2020), 112709.
<https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.112709>
- Zambrano-Gutiérrez, J. C., de Macedo, L. S. V., Picavet, M. E. B., & Puppim de Oliveira, J. A. (2023). Individuals in Collaborative Governance for Environmental Management. Environmental Management, 71(3), 565–586.
<https://doi.org/10.1007/s00267-022-01693-w>
- Zambrano, J., Valente de Macedo, L. S., Picavet, M. E. B., & Puppim de Oliveira, J. A. (2023). Individuals in Collaborative Governance for Environmental Management.
- Zhang, S., & Gu, Z. (2021). Impact of social capital on environmental governance efficiency – Behavior of Guangdong, China. Frontiers in Energy Research, 9, 781657.
<https://doi.org/10.3389/fenrg.2021.781657>

***Dr. Fachri Faisal, S.Si., M.Si (Corresponding Author)**

Universitas Bengkulu,
Perum Medan Baru RT. 13 No.61 Kel. Kandang Limun Kec. Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu 38122,
Indonesia
Email: fachrif@unib.ac.id

Gandiansyah Tarsan Efendi

Universitas Bengkulu,
Jalan Pasirah Z. Abidin No:58/Rt05/RW:02, Kelurahan Lubuk Lintang, Kecamatan Seluma, Kabupaten
Seluma, 38878, Indonesia
Email: gandi210805@gmail.com

Azzahra Faranisa

Universitas Bengkulu,
Jl. Wr Supratman, Perum Sakha Falih Blok A No 7, Kel. Bentiring, Kec. Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu,
38125, Indonesia
Email: rarazahraaza@gmail.com

Desi Br Harahap

Universitas Bengkulu,
Prum. PT. Agro Muko Seikiang Estate. Desa Lubuk Cabau. Kecamatan V Koto. Mukomuko, 38784, Indonesia
Email: desibrhatahap6@gmail.com

Rina Fatimah

Universitas Bengkulu,
Desa Air Merah, Dusun II, 39119, Indonesia
Email: fatimahrina00@gmail.com

Rizki Novriyansyah Wiguna

Universitas Bengkulu,
Kel. Napal RT 09, RW 03, Kec. Seluma, Kab. Seluma, 38876, Indonesia
Email: rizkinovriyansyahwiguna@gmail.com
